

OVERVIEW PAGU INDIKATIF **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**JUNI
2025**

Penanggung Jawab

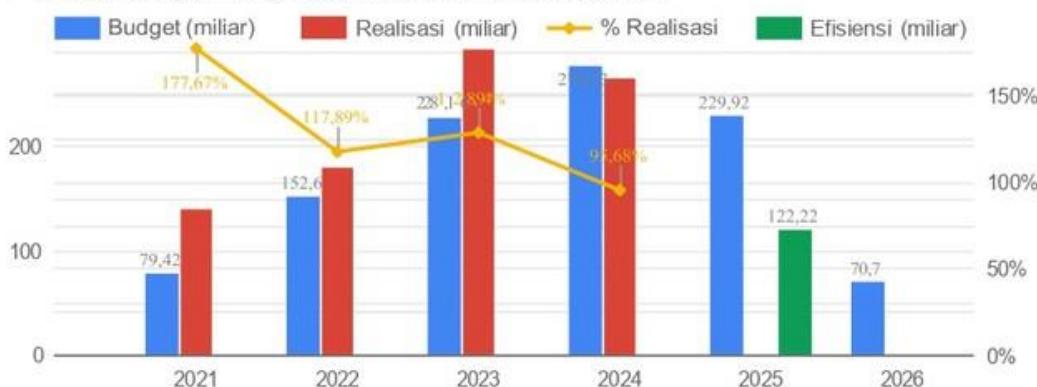
Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Slamet Dhul Fadli, S.E

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

70,70

APBN 2025 (miliar Rp)

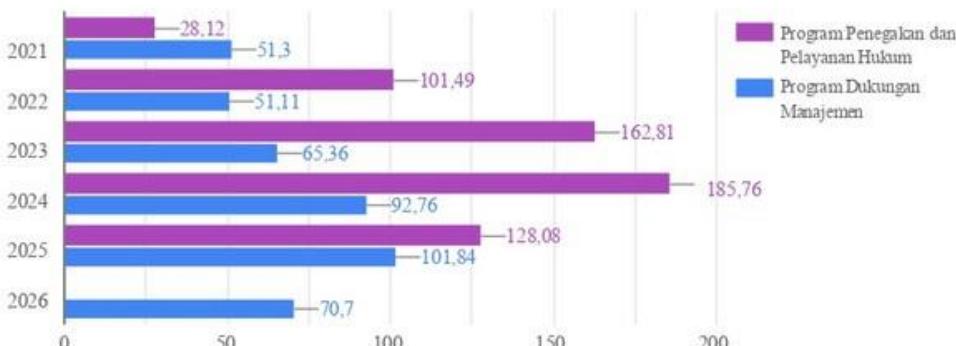
229,92

Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

122,22

53,2%

Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program

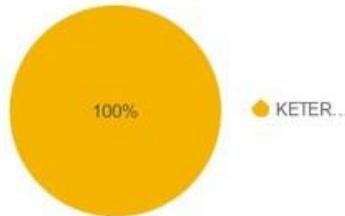


*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

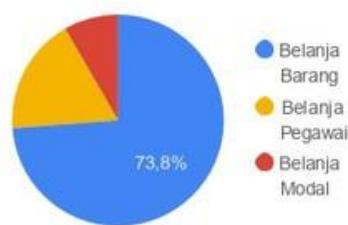
**) Angka 2025 merupakan angka APBN Bekala K/L TA 2025 berzumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

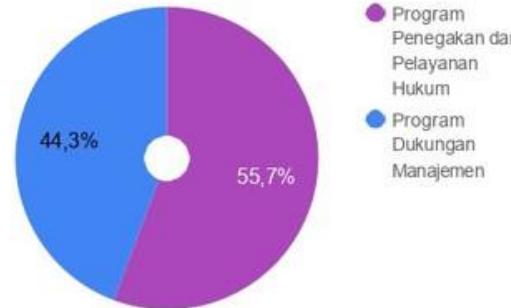
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



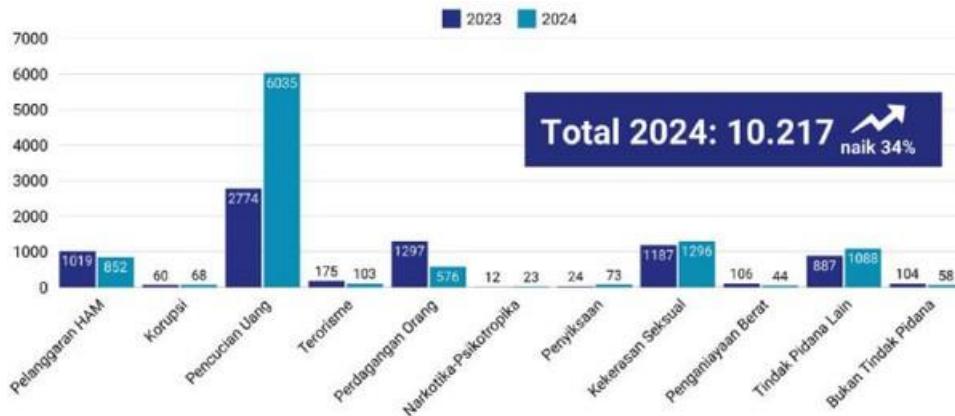
Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



Permohonan Perlindungan Berdasar Tindak Pidana Tahun 2024



*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. **) Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 berzumber dari NK RAPBN Tahun 2025.

Highlights Overview Pagu Indikatif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2026

- Terjadi peningkatan pagu anggaran yang signifikan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 LPSK mendapatkan pagu sebesar Rp 278.53 miliar. Selain itu, pada tahun 2024 LPSK mendapatkan persetujuan perpanjangan bantuan hibah *Counter Fund-Non Project Grant Aid* (CF-NPGA) dari Pemerintah Jepang sebesar Rp935.44 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan pembangunan penguatan tata kelola perlindungan Saksi dan Korban melalui teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Semula, alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025, LPSK mendapatkan pagu sebesar Rp229.92 miliar. Pagu ini dialokasikan untuk melaksanakan dua program, yaitu Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dengan alokasi sebesar Rp128.08 miliar dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp101.84 miliar. Selanjutnya, LPSK terdampak efisiensi belanja kementerian/lembaga TA 2025 sebesar Rp144.50 miliar atau sebesar 62,84% sehingga anggaran efektif LPSK menjadi Rp85.42 miliar.
- Ditinjau dari perkembangan pagu belanja berdasarkan program (2021–2026) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum selalu menerima porsi anggaran lebih besar dibanding Program Dukungan Manajemen. Peningkatan tertinggi terjadi pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada tahun 2024 sebesar Rp185,76 miliar. Program Dukungan Manajemen juga menunjukkan tren peningkatan stabil, meskipun anggarannya lebih rendah.
- Komposisi Belanja Berdasarkan Program (Tahun Anggaran Berjalan) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menyerap 55,7% dari total anggaran. Program Dukungan Manajemen menyerap 44,3%. Komposisi ini menunjukkan fokus utama lembaga pada pelaksanaan tugas inti dalam perlindungan saksi dan korban, namun tetap mempertahankan dukungan manajerial yang proporsional.
- Ditinjau dari Belanja Berdasarkan Jenis (Tahun Anggaran Berjalan), Belanja Barang mendominasi dengan 73,8% dari total anggaran. Belanja Pegawai dan Modal memiliki proporsi lebih kecil, menunjukkan efisiensi organisasi dan minimnya kebutuhan belanja modal. Dominasi Belanja Barang mencerminkan kegiatan operasional yang intensif, seperti dukungan langsung terhadap perlindungan saksi dan korban.
- Capaian strategis LPSK dalam penguatan layanan akses keadilan sepanjang 2024 diwujudkan lewat penerimaan permohonan sebanyak 10.217 orang dari para pencari keadilan. Jumlah pada 2024 tersebut mengalami kenaikan 34% dibandingkan 2023 sebanyak 7.645 pengajuan permohonan. Permohonan perlindungan pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengalami peningkatan signifikan, yaitu 118%, dari 2.774 permohonan pada 2023 menjadi 6.035 permohonan perlindungan pada tahun 2024.
- Sahabat Saksi dan Korban (SSK) merupakan program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Hingga berakhirnya pelaksanaan Program SSK sebagai kegiatan Prioritas Nasional pada 2024, sejak dibentuk pada 2022 telah terkumpul sebanyak 1.051 relawan yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia meliputi: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Aceh, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.